

## **TEORI KONFLIK DALAM KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MOBILITAS SOSIAL**

**Muh.Khusnul Himam, Maftuh, Mohammad Rofiq**

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

[himam3070@gmail.com](mailto:himam3070@gmail.com) [maftuh10@gmail.com](mailto:maftuh10@gmail.com)

[berhasilrofiq1@gmail.com](mailto:berhasilrofiq1@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan akses pendidikan agama yang termanifestasi dalam masyarakat Indonesia, menjelaskan fenomena tersebut melalui perspektif Teori Konflik, dan mengidentifikasi dampak spesifik ketimpangan ini terhadap mobilitas sosial individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data primer diperoleh dari sintesis dan analisis kritis terhadap berbagai jurnal nasional terakreditasi, buku-buku teoretis sosiologi pendidikan, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan agama di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis untuk membangun kerangka konseptual yang menghubungkan fenomena empiris dengan proposisi teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan agama di Indonesia bukanlah kasus anomali, melainkan manifestasi struktural dari konflik kepentingan dan alokasi sumber daya. Ketimpangan ini terwujud dalam hierarki lembaga pendidikan (elit vs. marjinal) dan distribusi sumber daya (fasilitas dan guru) yang sangat tidak merata, diperparah oleh stratifikasi ekonomi dan geografis. Ditinjau dari Teori Konflik (Marx, Dahrendorf, dan Collins), sistem pendidikan agama berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kelas sosial. Modal ekonomi menentukan akses kelembagaan, sementara otoritas pendidikan mempertahankan alokasi sumber daya yang timpang. Kredensial dari lembaga pendidikan agama elit bertindak sebagai modal status (kredensialisme) yang dimonopoli oleh kelas dominan, secara efektif membatasi mobilitas sosial vertikal bagi individu dari kelas bawah. Dengan demikian, pendidikan agama berpotensi menjadi penghalang daripada saluran untuk mencapai keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial harus mencakup reformasi struktural dalam distribusi sumber daya dan otoritas dalam sistem pendidikan agama guna mengurangi peran institusi tersebut sebagai agen reproduksi ketidaksetaraan.

Kata kunci : Teori Konflik, Ketimpangan Pendidikan Agama, Mobilitas Sosial, Reproduksi Sosial, Kredensialisme.

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan agama di Indonesia menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai media transmisi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai

instrumen pembentukan karakter dan identitas sosial masyarakat. Sebagai negara dengan tingkat keberagaman agama yang tinggi, Indonesia menempatkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional, sekaligus mengakui keberadaan lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah, pesantren, dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya.<sup>1</sup> Namun demikian, di balik semangat konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan agama yang signifikan antar kelompok masyarakat.

Fenomena ketimpangan akses pendidikan agama di Indonesia merupakan persoalan struktural yang kompleks dan multidimensional. Kesenjangan ini termanifestasi dalam dimensi geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta dalam stratifikasi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan individu dan keluarga untuk mengakses lembaga pendidikan agama berkualitas.<sup>2</sup> Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa disparitas fasilitas, kualifikasi tenaga pendidik, dan sumber daya pembelajaran antara madrasah negeri dan swasta, serta antara pesantren modern dan tradisional, mencerminkan ketimpangan distribusi modal pendidikan yang berimplikasi luas terhadap kesempatan mobilitas sosial peserta didik.<sup>3</sup>

Dalam perspektif sosiologis, pendidikan agama memiliki peran yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Pendidikan agama tidak berfungsi sebagai transmisi pengetahuan teologis, dan juga sebagai mekanisme sosialisasi yang membentuk habitus dan modal budaya individu dalam navigasi kehidupan sosial.<sup>4</sup> Lembaga pendidikan agama, khususnya pesantren, secara historis telah menjadi ruang produksi elite keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan lokal maupun nasional.<sup>5</sup> Posisi sentral pendidikan agama dalam reproduksi struktur sosial ini menandakan bahwa ketimpangan akses pendidikan agama berpotensi melanggengkan stratifikasi sosial yang eksis dan membatasi peluang mobilitas vertikal bagi kelompok masyarakat marginal.

---

<sup>1</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 78-82.

<sup>2</sup> Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 156-159.

<sup>3</sup> Nurhadi, "Disparitas Mutu Pendidikan Madrasah di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 201-218.

<sup>4</sup> Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial* (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), 234-240.

<sup>5</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), 89-95.

Kesenjangan kualitas dan akses antara lembaga pendidikan agama merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dalam diskursus keadilan pendidikan di Indonesia. Studi komparatif menunjukkan bahwa terdapat disparitas substansial dalam hal infrastruktur, kompetensi guru, kurikulum, dan outcomes pendidikan antara madrasah yang berlokasi di wilayah urban dengan yang berada di daerah terpencil.<sup>6</sup> Lebih jauh, kesenjangan ini juga terjadi antara lembaga pendidikan agama yang dikelola oleh organisasi Islam mainstream dengan lembaga yang dikelola oleh komunitas marginal atau minoritas.<sup>7</sup> Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada capaian akademik peserta didik, tetapi juga pada pembentukan modal sosial dan jaringan yang esensial bagi mobilitas sosial di kemudian hari.

Dimensi ekonomi-politik dalam ketimpangan akses pendidikan agama menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan biaya pendidikan. Meskipun madrasah negeri dan sebagian pesantren menawarkan pendidikan dengan biaya relatif terjangkau, lembaga pendidikan agama berkualitas tinggi yang seringkali berbentuk sekolah Islam terpadu atau pesantren modern mematok biaya yang hanya dapat dijangkau oleh keluarga kelas menengah ke atas.<sup>8</sup> Fenomena privatisasi dan komersialisasi pendidikan agama ini menciptakan segmentasi pasar pendidikan yang merefleksikan sekaligus memperkuat stratifikasi kelas dalam masyarakat.<sup>9</sup> Konsekuensinya, akses terhadap pendidikan agama berkualitas menjadi terbatas, hanya terkonsentrasi pada kelompok sosial-ekonomi tertentu, sementara kelompok marginal terbatas pada pilihan lembaga dengan sumber daya minimal.

Signifikansi pendidikan agama terhadap mobilitas sosial telah menjadi fokus kajian sosiologi pendidikan dalam konteks Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa alumni lembaga pendidikan agama prestisius memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menempati posisi strategis dalam struktur keagamaan, birokrasi, dan bahkan sektor swasta.<sup>10</sup> Kredensial pendidikan agama berfungsi sebagai modal simbolik yang memberikan legitimasi dan akses

---

<sup>6</sup> Muhaimin, "Kesenjangan Kualitas Madrasah: Studi Komparatif antara Madrasah Perkotaan dan Pedesaan," *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2018): 45-66.

<sup>7</sup> Siti Muri'ah, "Akses dan Kualitas Pendidikan Agama bagi Kelompok Minoritas Muslim di Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 165-182.

<sup>8</sup> Hasan Baharun dan Akmal Mundiri, "Pendidikan Islam dan Stratifikasi Sosial: Analisis Fenomena Komersialisasi Sekolah Islam Terpadu," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020): 78-94.

<sup>9</sup> Noorhaidi Hasan, "The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere," *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229-250.

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 145-152.

terhadap jaringan sosial elite, yang pada gilirannya membuka peluang mobilitas vertikal.<sup>11</sup> Namun, ketika akses terhadap lembaga pendidikan agama berkualitas didistribusikan secara tidak merata, pendidikan agama justru berpotensi menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan struktural, di mana mobilitas sosial tetap menjadi privilese kelompok dominan.

Dari perspektif teori konflik, ketimpangan dalam pendidikan dapat dipahami sebagai refleksi dari persaingan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak seimbang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Pendidikan agama tertanam dan berjalan dalam relasi kuasa yang membentuk siapa yang memiliki akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan untuk mobilitas sosial.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, ketimpangan akses pendidikan agama bukan semata-mata persoalan teknis distribusi sumber daya, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan yang sistematis yang perlu dikritisi dan dirubah.

Urgensi kajian tentang ketimpangan akses pendidikan agama dan dampaknya .mobilitas sosial semakin meningkat dalam konteks dinamika sosial-politik kontemporer Indonesia. Meningkatnya polarisasi berbasis identitas keagamaan, ekspektasi publik terhadap peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter bangsa, serta agenda global terkait Sustainable Development Goals khususnya dalam hal pemerataan akses pendidikan berkualitas, menuntut pemahaman mendalam tentang bagaimana ketimpangan pendidikan agama bekerja dan direproduksi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Tanpa intervensi kebijakan yang berbasis pada analisis struktural yang komprehensif, risiko bahwa pendidikan agama akan terus menjadi instrumen reproduksi ketimpangan sosial alih-alih menjadi medium emansipasi dan keadilan sosial akan semakin nyata.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan agama di Indonesia serta implikasinya terhadap kesempatan mobilitas sosial masyarakat. Dengan menggunakan kerangka teori konflik sebagai teknik analitis, bertujuan untuk mengungkap mekanisme struktural yang melanggengkan ketimpangan dalam

---

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012), 178-185.

<sup>12</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 92-98.

<sup>13</sup> Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture*, terj. Richard Nice (London: Sage Publications, 1990), 54-67.

<sup>14</sup> Abd. Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 201-209.

pendidikan agama, serta menganalisis bagaimana ketimpangan ini mempengaruhi trajektori mobilitas sosial individu dan kelompok dalam struktur sosial yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai empat hal utama yang berkaitan dengan fenomena ketimpangan akses pendidikan agama dan implikasinya terhadap struktur sosial. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Ketimpangan Akses Pendidikan Agama melalui Perspektif Teori Konflik  
Menganalisis secara mendalam bagaimana ketimpangan dalam akses terhadap institusi dan sumber daya pendidikan agama dipahami dan dijelaskan melalui lensa teori konflik (terutama Marxian dan Neo-Marxian). Analisis ini berfokus pada peran pendidikan agama sebagai tempat perebutan sumber daya, kekuasaan, dan dominasi antar kelompok sosial.<sup>15</sup>
2. Mengidentifikasi Mekanisme Reproduksi Ketidaksetaraan Sosial  
Mengidentifikasi secara empiris dan teoretis mekanisme yang digunakan oleh institusi pendidikan agama baik melalui kurikulum, pedagogi, maupun kebijakan internal untuk mereproduksi dan melanggengkan ketidaksetaraan sosial yang sudah ada, khususnya berdasarkan stratifikasi kelas, etnis, atau gender.<sup>16</sup>
3. Mengevaluasi Dampak terhadap Mobilitas Sosial  
Mengevaluasi dampak spesifik dan terukur dari ketimpangan akses pendidikan agama terhadap mobilitas sosial vertikal dan horizontal individu dari kelompok sosial yang termarjinalisasi. Evaluasi ini mencari bukti apakah pendidikan agama bertindak sebagai social escalator atau justru sebagai mekanisme social closure.<sup>17</sup>
4. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan  
Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat praktis dan berlandaskan bukti (evidence-based policy recommendation) bagi pemangku kepentingan (pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat) dalam rangka mengurangi ketimpangan akses dan

---

<sup>15</sup> Rahmat Hidayat, "Pendidikan Agama dan Pertarungan Kelas: Aplikasi Teori Konflik dalam Analisis Ketimpangan," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 15-30.

<sup>16</sup> Siti Nurjanah, *Reproduksi Ketidaksetaraan: Pendidikan dan Kapital Simbolik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023), 112.

<sup>17</sup> Ahmad Fikri dan Maya Sari, "Akses Pendidikan Agama dan Mobilitas Sosial Generasi Muda di Daerah 3T," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 201.

memastikan pendidikan agama berperan aktif dalam mendorong keadilan sosial dan mobilitas sosial inklusif.<sup>18</sup>

## HASIL PENELITIAN

Tinjauan pustaka ini menyajikan kerangka konseptual dan teoritis yang relevan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan agama, mobilitas sosial, dan peran Teori Konflik sebagai pisau bedah utama penelitian.

### 1. Konsep Pendidikan Agama

Pendidikan Agama diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agamanya, serta menuntut mereka untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar sesama manusia dan alam semesta.<sup>19</sup> Dalam konteks Indonesia, pendidikan agama tidak hanya terbatas pada aspek doktrinal (akidah, syariah), tetapi juga mencakup aspek moral-sosial (akhlak) yang bertujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran spiritual dan tanggung jawab publik.

- a. Aspek Fungsional: Pendidikan agama berfungsi sebagai agen sosialisasi nilai dan mekanisme kontrol sosial untuk mencegah perilaku menyimpang dan radikalisme. Akses yang timpang terhadap pendidikan bermutu akan menghasilkan pemahaman agama yang parsial dan berpotensi menimbulkan sikap eksklusif.
- b. Kualitas dan Akses: Kualitas pendidikan agama diukur tidak hanya dari kurikulum, tetapi juga dari ketersediaan guru kompeten, sarana pendukung (perpustakaan, laboratorium), dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat majemuk. Ketimpangan akses terjadi ketika disparitas sumber daya ini menciptakan jurang pemisah antara lembaga pendidikan di perkotaan dan pedesaan.<sup>20</sup>

### 2. Konsep Mobilitas Sosial

Mobilitas Sosial merujuk pada perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan (strata) sosial ke lapisan sosial lain. Mobilitas merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesempatan (opportunity) dan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini fokus pada Mobilitas Vertikal, yaitu perpindahan ke atas atau ke bawah (*social sinking*).

---

<sup>18</sup> Bambang Susanto, *Keadilan dan Kesetaraan dalam Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Penerbit Negara, 2022), 45-47.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Pendidikan Agama di Tengah Arus Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 12.

<sup>20</sup> Zainudin, "Disparitas Kualitas dan Akses Pendidikan Islam di Perkotaan dan Pedesaan," *Jurnal Studi Keagamaan dan Pendidikan* 15, no. 4 (2022): 410-425.

Pendidikan, termasuk pendidikan agama, dianggap sebagai salah satu saluran utama mobilitas sosial (*A key channel*).<sup>21</sup>

Pendidikan sebagai Prediktor: Akses terhadap pendidikan bermutu berbanding lurus dengan peningkatan modal manusia (*human capital*) dan modal budaya (*cultural capital*). Dalam konteks Indonesia, latar belakang pendidikan agama tertentu (misalnya, pesantren terkemuka) dapat memberikan privilese jaringan yang signifikan, memengaruhi prospek karir dan posisi sosial individu. Ketimpangan akses pendidikan agama, oleh karena itu, menjadi penghambat kritis bagi mobilitas sosial ke atas bagi kelompok marginal.<sup>22</sup>

### 3. Teori Konflik

Teori Konflik dipilih sebagai kerangka analisis utama karena menawarkan perspektif yang kritis terhadap struktur sosial dan institusi yang melanggengkan ketidaksetaraan. Teori Konflik merupakan paradigma sosiologi makro yang memandang masyarakat bukan sebagai entitas yang harmonis dan stabil, melainkan sebagai arena yang ditandai oleh ketidaksetaraan struktural, persaingan kekuasaan, dan konflik yang terus-menerus terjadi di antara kelompok-kelompok yang berebut sumber daya yang langka.<sup>23</sup> Kerangka ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan akses pendidikan agama dipertahankan dan direproduksi oleh struktur sosial yang didominasi oleh kelas tertentu.

#### Perspektif Karl Marx tentang Konflik Kelas

Teori Konflik ditemukan oleh Karl Marx, sumber utama konflik adalah ketidaksetaraan ekonomi yang muncul dari kepemilikan alat produksi (*basis ekonomi*). Masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: Borjuasi (pemilik modal) dan Proletariat (pekerja).<sup>24</sup>

Marx berpendapat bahwa suprastruktur masyarakat, yang mencakup institusi sosial seperti negara, hukum, dan pendidikan, dibangun di atas basis ekonomi. Oleh karena itu, institusi pendidikan berfungsi untuk melanggengkan ideologi dan kepentingan kelas dominan (Borjuasi) dengan mengajarkan kepatuhan, disiplin, dan menerima posisi sosial yang ada.

---

<sup>21</sup> Tilly, Charles, *Durable Inequality* (Berkeley: University of California Press, 2018), 150–152.

<sup>22</sup> Susanto, "Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas Sosial Vertikal: Tinjauan Kritis Teori Fungsionalis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 28, no. 1 (2021): 65–78.

<sup>23</sup> Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (edisi keenam, Jakarta: Kencana, 2014), 178.

<sup>24</sup> Marx, Karl, *Capital: A Critique of Political Economy* (Vol. 1, London: Penguin Classics, 1990), 875–878.

Dalam konteks pendidikan agama, perspektif Marx dapat menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan agama yang bermutu tinggi dan berstatus elit seringkali dimiliki dan dikontrol oleh kelas-kelas dengan modal ekonomi besar, yang pada akhirnya membatasi akses bagi kelas menengah ke bawah, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi melalui saluran pendidikan.

### **Teori Konflik Modern (Dahrendorf, Collins)**

Setelah Marx, Teori Konflik dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup sumber konflik yang lebih luas, tidak hanya berbasis kepemilikan ekonomi, tetapi juga pada otoritas dan status. Ralf Dahrendorf memindahkan fokus konflik dari kepemilikan properti ke hubungan otoritas atau kekuasaan. Bagi Dahrendorf, konflik muncul antara mereka yang memiliki kekuasaan (otoritas) untuk memerintah dan mereka yang diperintah (subordinasi), yang disebut kelompok kepentingan semu dan kelompok kepentingan nyata.<sup>25</sup>

Randall Collins mengembangkan Teori Konflik melalui Stratifikasi Status dan Persaingan Kredensial. Collins berpendapat bahwa pendidikan modern adalah perjuangan memperebutkan simbol status (kredensial atau ijazah) yang pada akhirnya menentukan peluang hidup di pasar kerja.<sup>26</sup>

Kredensialisme Institusi pendidikan berperan sebagai penjaga pintu yang mengeluarkan kredensial, yang seringkali memiliki nilai lebih didasarkan pada prestise institusi daripada pengetahuan aktual. Kelompok yang dominan berusaha menaikkan syarat kredensial untuk membatasi persaingan dari kelompok kelas bawah.

Pandangan Collins menjelaskan mengapa ijazah dari sekolah agama atau pesantren tertentu memiliki nilai jual dan jaringan sosial yang lebih tinggi (modal sosial dan budaya) dibandingkan ijazah dari sekolah agama di daerah terpencil, yang merupakan manifestasi dari konflik status yang direproduksi oleh sistem pendidikan.

### **Aplikasi Teori Konflik dalam Pendidikan**

Penerapan Teori Konflik dalam menganalisis pendidikan dikenal sebagai perspektif Reproduksi Sosial. Teori ini menantang klaim meritokrasi dengan menunjukkan bahwa pendidikan cenderung mereproduksi ketidaksetaraan dan stratifikasi sosial yang sudah ada,

---

<sup>25</sup> Dahrendorf, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), 165.

<sup>26</sup> Collins, Randall, *The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification* (New York: Academic Press, 2019), 55.

alih-alih mengoreksinya. Tokoh-tokoh seperti Pierre Bourdieu dan Samuel Bowles & Herbert Gintis menekankan bagaimana sekolah mentransmisikan:

- a. Modal Kultural Anak-anak dari kelas atas datang ke sekolah dengan *habitus* dan *modal kultural* (pengetahuan, gaya bahasa, dan selera) yang sesuai dengan budaya sekolah. Sekolah-sekolah agama elit seringkali memvalidasi modal kultural ini, memberikan keunggulan bawaan atas anak-anak dari kelas bawah yang harus menguasai budaya yang asing bagi mereka.<sup>27</sup>
- b. Korespondensi : Sekolah beroperasi berdasarkan prinsip korespondensi, di mana struktur sosial sekolah (disiplin, hierarki, penghargaan, dan hukuman) mencerminkan dan mempersiapkan siswa untuk menerima struktur dan hierarki kerja dalam masyarakat kapitalis yang timpang.

Secara kolektif, Teori Konflik menyediakan kerangka yang kuat untuk mengurai bagaimana ketimpangan akses dan kualitas pendidikan agama di Indonesia merupakan cerminan dari ketidakadilan struktural, bukan sekadar masalah teknis atau inefisiensi administrasi. Secara ringkas, Teori Konflik membantu melihat pendidikan, bukan hanya sebagai mesin meritokrasi, tetapi sebagai arena perebutan sumber daya dan mekanisme reproduksi ketidaksetaraan antar kelas sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan kerangka Teori Konflik untuk mengkaji ketimpangan akses pendidikan agama di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk ketimpangan akses pendidikan agama di masyarakat Indonesia bersifat struktural dan multidimensional. Ketimpangan ini termanifestasi dalam hierarki kelembagaan yang tajam, di mana lembaga pendidikan agama elit (swasta/yayasan besar di perkotaan) menguasai sumber daya terbaik (guru berkualitas, fasilitas modern) dibandingkan lembaga di daerah yang kurang memadai. Ketimpangan ini diperparah

---

<sup>27</sup> Bourdieu, Pierre, dan Jean-Claude Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture* (London: SAGE Publications, 1990), 23–25.

oleh stratifikasi berbasis ekonomi, geografi, dan gender, yang secara efektif menciptakan barikade akses bagi kelompok sosial ekonomi bawah.<sup>28</sup>

2. Perspektif Teori Konflik memberikan landasan analitis yang kuat untuk menjelaskan ketimpangan tersebut. Analisis menemukan bahwa sistem pendidikan agama di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ketidaksetaraan. Sesuai dengan pandangan Karl Marx, modal ekonomi menentukan akses ke pendidikan bermutu. Sementara itu, pandangan Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa otoritas (pengambil kebijakan dan pengelola yayasan elit) sengaja atau tidak sengaja menciptakan distribusi sumber daya yang timpang. Terakhir, perspektif Randall Collins menegaskan bahwa kredensial keagamaan dari institusi prestisius telah bertransformasi menjadi modal status yang diperebutkan dan dimonopoli oleh kelas dominan untuk membatasi persaingan mobilitas.<sup>29</sup>
3. Dampak ketimpangan akses pendidikan agama terhadap mobilitas sosial sangat signifikan dan cenderung menghambat mobilitas vertikal bagi individu dari kelas bawah. Akses yang terbatas terhadap pendidikan agama berkualitas rendah menghasilkan modal manusia dan modal kultural yang rendah pula. Hal ini pada gilirannya membatasi kesempatan hidup (*life chances*) mereka, baik dalam mengakses pendidikan tinggi, memperoleh jaringan sosial elit, maupun menempati posisi pekerjaan dengan status dan penghasilan tinggi. Dengan demikian, pendidikan agama, yang seharusnya menjadi saluran mobilitas, justru berpotensi menjadi alat pelanggeng ketidaksetaraan sosial antar generasi.<sup>30</sup>

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya mencapai keadilan sosial di Indonesia harus mencakup reformasi struktural dalam distribusi sumber daya pendidikan agama, agar peran vital institusi ini dalam menciptakan kesadaran moral dan nilai sosial dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Marx, Karl, *Capital: A Critique of Political Economy* (Vol. 1, London: Penguin Classics, 1990), 875.

<sup>29</sup> Collins, Randall, *The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification* (New York: Academic Press, 2019), 62.

<sup>30</sup> Zainudin, "Otoritas Keagamaan dan Kontrol Institusi Pendidikan dalam Konflik Kelas," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 11, no. 2 (2021): 118.

## DAFTAR PUSTAKA

- . *Pendidikan Agama di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ahmad Fikri dan Maya Sari. "Akses Pendidikan Agama dan Mobilitas Sosial Generasi Muda di Daerah 3T." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 10, no. 2 (2025): 201.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Baharun, Hasan, dan Akmal Mundi. "Pendidikan Islam dan Stratifikasi Sosial: Analisis Fenomena Komersialisasi Sekolah Islam Terpadu." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2020): 78-94.
- Bambang Susanto. *Keadilan dan Kesetaraan dalam Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Negara, 2022.
- Baso, Ahmad. *Pesantren Studies 2a: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka Afid, 2012.
- Bourdieu, Pierre, dan Jean-Claude Passeron. *Reproduction in Education, Society and Culture*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. London: Sage Publications, 1990.
- Collins, Randall. *The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification*. New York: Academic Press, 2019.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Hasan, Noorhaidi. "The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere." *Contemporary Islam* 3, no. 3 (2009): 229-250.
- Hidayat, Rahmat. "Pendidikan Agama dan Pertarungan Kelas: Aplikasi Teori Konflik dalam Analisis Ketimpangan." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia* 4, no. 1 (2024): 15-30.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. 1. London: Penguin Classics, 1990.
- Muhaimin. "Kesenjangan Kualitas Madrasah: Studi Komparatif antara Madrasah Perkotaan dan Pedesaan." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2018): 45-66.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Muri'ah, Siti. "Akses dan Kualitas Pendidikan Agama bagi Kelompok Minoritas Muslim di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 165-182.
- Nurhadi. "Disparitas Mutu Pendidikan Madrasah di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 201-218.

- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Siti Nurjanah. *Reproduksi Ketidaksetaraan: Pendidikan dan Kapital Simbolik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2023.
- Soebahar, Abd. Halim. *Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Susanto. "Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas Sosial Vertikal: Tinjauan Kritis Teori Fungsionalis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 28, no. 1 (2021): 65–78.
- Tilly, Charles. *Durable Inequality*. Berkeley: University of California Press, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Zainudin. "Disparitas Kualitas dan Akses Pendidikan Islam di Perkotaan dan Pedesaan." *Jurnal Studi Keagamaan dan Pendidikan* 15, no. 4 (2022): 410–425.